



Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kawasan Papua

Latifah Latifah^a, Diah Setyorini Gunawan^{*b}, Agus Arifin^c

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ekonomi, latifah@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ekonomi, diah.g@unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ekonomi, agus.arifin@unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Poverty is a complex and multidimensional problem. Papua is an area that has the highest poverty conditions in Indonesia. This research uses panel data consisting of the provinces of Papua and West Papua for the period 2008-2022. The analysis technique used is panel data regression. The results of the analysis show that profit sharing funds and village funds have a negative and significant effect on poverty in Papua. General allocation funds and special allocation funds have a positive and significant effect on poverty. Special autonomy funds and regional spending have no effect on poverty in Papua. The implication of this research is the need to optimize the realization of DAU, DAK, Special Autonomy Funds, and Regional Expenditures so as to reduce poverty levels.

Keywords: *Regional expenditure, special allocation funds, general allocation funds, profit-sharing funds, village funds, special autonomy funds.*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan multidimensi. Papua merupakan daerah yang memiliki kondisi kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua Barat dengan kurun waktu 2008-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana bagi hasil dan dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dana otsus dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua. Implikasi pada penelitian ini adalah perlunya optimalisasi realisasi DAU, DAK, Dana Otsus dan Belanja Daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

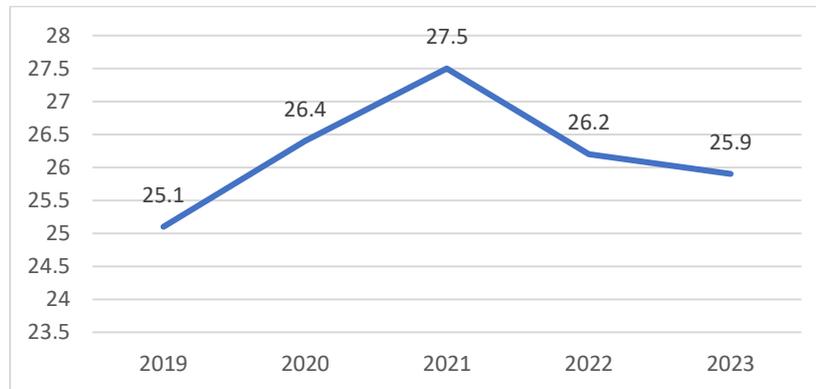
Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dan multidimensi yang seiring berjalannya waktu berkembang menjadi permasalahan global, nasional, bahkan lokal sehingga memerlukan perhatian banyak pihak dan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Bahkan dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama (Solomon, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang serius.

Setiap negara berkembang memiliki masalah kemiskinan termasuk Indonesia. Kondisi kemiskinan sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun yang seharusnya diatasi secara komperhensif. Gambar 1. menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami

peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pandemi covid-19. Seiring berjalan waktu tingkat kemiskinan menurun hingga tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan sejtanya angka 25,9 juta jiwa merupakan angka yang tidak sedikit. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah serius yaitu kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Juta Jiwa), Tahun 2019-2023

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi yang berbeda-beda di setiap pulau. Kondisi yang berbeda ini akan menimbulkan suatu ketertinggalan bagi daerah yang minim pembangunan. Berikut merupakan kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan pulau:

Tabel 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Pulau (Persen), 2019-2023

No	Pulau	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sumatera	9,63	9,49	9,79	9,22	9,00
2.	Jawa	8,06	8,85	9,30	8,59	8,40
3.	Kalimantan	5,92	5,85	6,21	5,92	5,73
4.	Sulawesi	11,27	11,06	11,35	11,10	11,09
5.	Bali, NTT, NTB, Maluku	12,78	12,57	12,88	12,10	12,19
6.	Papua	24,85	24,01	24,35	23,95	23,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 1. menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia jika dilihat secara persentase maka Papua menjadi pulau dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi disetiap tahunnya. Setiap tahunnya kondisi kemiskinan Papua dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Pulau Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa Papua merupakan pulau yang paling tertinggal dalam hal kemiskinan.

Indonesia memiliki luas wilayah yang besar yang terbagi dari pulau-pulau. Kondisi ini akan memaksa terjadinya suatu masalah yaitu sulitnya pemerataan antar daerah. Dengan adanya perbedaan antar daerah maka pelaksanaan kebijakan yang dilakukan disetiap daerahnya berbeda satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah akan memberikan suatu kewenangan bagi daerah dalam mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada. Namun masih terdapat koordinasi dan pengawasan dari pusat kepada daerah (Granado et al., 2018).

Otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah sampai kepada pengaturan keuangan atau ranah fiskal yang biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini akan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur keuangan sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Permai et al., (2021), Ramírez et al., (2017) dan Siburian (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan keuangan ditingkat daerah yang dilakukan secara mandiri akan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menangani masalah yang berbeda-beda satu sama lain (Sambanis & Milanovic, 2014).

Desentralisasi fiskal yang mendasari bahwa keuangan ditingkat daerah diatur berdasarkan wewenang daerah sendiri (Ghozali & Khoirunurrofik, 2020). Hubungan antara keuangan pusat dan daerah diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. UU ini mengatur mengenai keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi fiskal yang didalamnya mengatur dana transfer ke daerah (TKD). Dana ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan dana desa. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya bantuan dana transfer ke daerah tersebut pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi fiskal memberikan keadilan bagi setiap daerah. Hal ini ditunjukkan oleh diberikannya dana otonomi khusus bagi setiap daerah yang memang sudah seharusnya diberikan perhatian khusus. Daerah tersebut salah satunya adalah Papua. Kondisi pembangunan di Papua sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Dimana pembangunan di Papua tertinggal sehingga berdasarkan Tabel 1. kondisi kemiskinan di Papua paling tinggi diantara daerah-daerah lain. Seharusnya papua dapat menekan tingkat kemiskinan dikarenakan TKD yang diberikan oleh pusat relative tinggi dikarenakan terdapat tambahan

dana otonomi khusus. Berikut merupakan table yang menunjukkan TKD, dan belanja di Papua:

Tabel 2. Transfer Ke Daerah (TKD) dan Belanja Daerah Papua (Milliar Rupiah), 2018-2022

No	Provinsi	Jenis Belanja	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Papua Barat	DBH	965,76	1431,33	444,56	4008,94	6947,07
		DAU	1456,52	491,56	3948,52	3947,79	9269,30
		DAK	2231,67	1299,87	483,38	4018,84	9746,95
		Dana Otsus	999,22	1307,71	656,20	4015,25	8040,53
		Belanja Daerah	3275,58	1307,71	477,23	2306,84	7536,64
2.	Papua	DBH	924,04	2571,30	918,90	8020,85	13186,89
		DAU	2616,55	1198,62	8689,89	8674,68	13421,68
		DAK	694,87	2330,02	612,72	7999,97	12607,00
		Dana Otsus	1101,64	2314,92	481,33	7911,84	14859,61
		Belanja Daerah	2079,38	2314,92	751,53	3792,66	11546,21

Sumber : Kementerian Keuangan, 2023

Papua merupakan salah satu daerah yang tertinggal. Olehkarena itu papua memiliki dana otonomi khusus yang tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan dana tersebut. Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa dana otsus relatif tinggi. Seharusnya dengan dana transfer ke daerah yang ditambah oleh dana otonomi khusus papua dapat memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun berdasarkan Tabel 1. menunjukkan papua memiliki kondisi kemiskinan yang paling tinggi diantara daerah-daerah lain.

Penelitian Hanif et al., (2014) dan Khusaini, (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari pendapatan dan belanja pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu instrumen fiskal adalah dana transfer ke daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail & Hakim, (2014), Manduapessy (2020), yahidin & Jalil (2020) Gumelar, (2021), Nany et al., (2022), Mardiansyah et al, (2023), menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan DAK berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK ketika ditingkatkan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain DBH, DAU, dan DAK dana transfer ke daerah juga terdiri dari dana desa.

Dana desa merupakan salah satu dana yang ditransferkan oleh pusat kepada daerah untuk membangun desa. Dana desa dilaksanakan pada tahun 2015 setelah disahkannya UU no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Namun pada pelaksanaannya dana desa seringkali tidak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Aziz (2017) mengenai pengelolaan keuangan di desa menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa masih dinyatakan belum efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penelitian Arham & Rauf (2020) memberikan temuan yang berlawanan mengenai transfer dana desa tidak signifikan membantu memerangi ketimpangan, mengingat penggunaan dana tersebut cenderung berpihak pada aparatur desa atau kerabatnya secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa harus ditelaah secara konferhensif pemanfaatannya.

Papua merupakan daerah yang mendapatkan dana alokasi khusus, bukan hanya DBH, DAU, dan DAK. Dana alokasi khusus bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal sehingga mengatasi kesenjangan. Hal ini dilakukan di Papua dikarenakan Papua merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Kadafi & Murtala, (2020) menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus harus ditelaah secara konferhensif di daerah papua dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan.

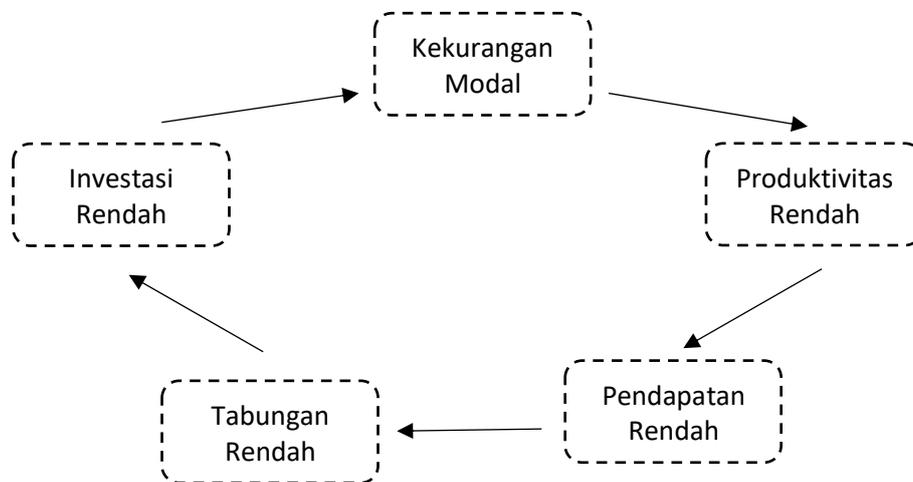
Dana transfer ke daerah tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan asas desentralisasi fiscal. Dimana belanja daerah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang berwenang dengan tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Lucia et al., (2023) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika belanja daerah ditingkatkan maka kemiskinan akan menurun.

Kemiskinan masih menjadi masalah di Papua. Tabel 1 menunjukkan bahwa Papua memiliki angka kemiskinan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Faktanya, Papua menerima pembayaran transfer ke daerah jauh lebih besar dibandingkan daerah lain karena adanya tambahan dana alokasi khusus yang tidak diterima daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, dan dana desa terhadap kemiskinan di Papua.

2. TELAAH PUSTAKA

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi setiap individu atau organisasi yang tidak mampu mempertahankan kualitas hidup yang dapat diterima. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik atau minimum (Mudrajad, 2004). Regnar Nurske mengemukakan teori kemiskinan pada tahun 1953 melalui bukunya *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (Todaro & Smith, 2014). Hipotesis siklus kemiskinan menguraikan bagaimana kemiskinan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berinteraksi sehingga menciptakan situasi sulit. Ilustrasi berikut menggambarkan siklus kemiskinan.



Sumber: Todaro & Smith 2014

Gambar 2. Lingkaran Kemiskinan

Menurut hipotesis lingkaran setan kemiskinan Nurkse, kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, inefisiensi pasar, dan kurangnya modal, yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mereka menyebabkan rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah menyebabkan keterbelakangan, dan seterusnya (Todaro dan Smith, 2014).

b. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal mengacu pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah otonom. Desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pemerataan daerah. Setiap daerah mempunyai karakteristik yang unik sehingga memerlukan formulasi anggaran yang berbeda-beda (Hastuti, 2018).

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kawasan Papua

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya (Tobing, 2021). Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan daerah akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat yang memahami situasi di daerahnya masing-masing. Salah satu program yang tunduk pada peraturan independen adalah keuangan daerah, yang kadang-kadang dikenal sebagai desentralisasi fiskal.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan meneliti angka. Hasil analisis berdasarkan statistika akan dijelaskan sebagai bahan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari provinsi papua dan papua barat dalam kurun waktu 2008-2022. Penelitian ini akan menggunakan metode regresi data panel.

3.1. Regresi Berganda Data Panel

Regresi data panel merupakan metode regresi berganda dengan menggunakan kombinasi data *cross-section* dan data *time series*. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Belanja Daerah, dan Efektivitas Dana Desa terhadap kemiskinan di Papua. Berikut merupakan model dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X1 + \beta_2X2 + X3 + \beta_4X4 + \beta_5X5 + \beta_6X6 + e$$

Keterangan:

Y	: Kemiskinan
X1	: Dana Bagi Hasil
X2	: Dana Alokasi Umum
X3	: Dana Alokasi Khusus
X4	: Dana Otonomi Khusus
X5	: Belanja Daerah
X6	: Dana Desa (Dummy, sebelum 2015 = 0 dan sesudah 2015 = 1)
e	: Error

3.2. Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam menentukan model yang terbaik diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut merupakan hipotesis uji chow (Ghozali, 2018):

H_0 = Common Effect Model

H_a = Fixed Effect Model

Jika nilai *prob cross-section chi-square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain model yang terbaik adalah FEM begitu pula sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Efek Model* (REM). Berikut merupakan hipotesis uji hausman:

H_0 = Random Effect Model

H_a = Fixed Effect Model

Jika nilai *prob cross-section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain model yang terbaik adalah FEM. Begitu juga sebaliknya.

3. Uji Lagrange Multiple

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang terbaik diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berikut merupakan hipotesis uji lagrange multiple:

H_0 = Common Effect Model

H_a = Random Effect Model

Jika nilai *prob cross-section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain model yang terbaik adalah REM. Begitu juga sebaliknya

3.3. Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu. atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan JB test. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi secara normal, begitu pula sebaliknya.

2. Multikolienaritas

Menurut Ghozali, (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Penelitian ini menggunakan uji korelasi. Dimana jika korelasi diatas $>0,09$ dapat dikatakan model terdapat gejala multikolienaritas.

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual. Model regresi yang baik mempunyai varian yang sama atau homoskedastisitas. Salah satu cara mengetahui heteroskedastisitas adalah dengan metode glejser. Kriteria nilai signifikansi menjadi suatu parameter jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model dinyatakan tidak terdapat gejala heterokedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2018). Analisis akan dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson.

3.4.Uji Statistik

1. Uji F

Uji F atau biasa disebut uji serentak (simultan) merupakan rangkaian uji untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama variabel independent terhadap variabel dependent (Gujarati, 2013). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah berpengaruh bersama-sama atau tidak. Berikut merupakan hipotesis uji F:
 $H_0 : \beta_{ij} = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan)

$H_a: \beta_{ij} \neq 0$ (terdapat pengaruh secara bersama-sama antara DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan)

Kriteria pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua.

2. Uji t

Uji t merupakan rangkaian uji untuk menganalisis pengaruh secara parsial. Uji ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent (Gujarati, 2013). Berikut merupakan hipotesis uji t:

$H_0 : \beta_{ij} \geq 0$ (masing-masing variabel bebas yaitu DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan)

$H_a: \beta_{ij} < 0$ (masing-masing variabel bebas yaitu DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan)

Kriteria pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua.

3.5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah koefisien untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent (Gujarati, 2013). Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R^2 yang mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent semakin baik, begitu juga sebaliknya.

4. HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Dilakukan uji Chow untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* (FEM) dan *common effect model* (CEM). Pada pengujian pertama, nilai *p-value cross-section chi-square* sebesar $0,1158 > 0,05$ yang berarti bahwa CEM adalah model terpilih. Selanjutnya, dilakukan Uji *lagrange multiplier* untuk memilih model terbaik antara CEM dan *random effect model* (REM). Hasil menunjukkan bahwa nilai *p-value cross section breusch-pagan* adalah $0,4820 > 0,05$ yang berarti bahwa CEM adalah model terpilih untuk penelitian ini.

4.2. Regresi Data Panel

Berikut merupakan hasil analisis berdasarkan pemilihan model terbaik yaitu Common Effect Model:

Tabel 3. Regresi Data Panel *Common Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
DBH	-2.132	8.6213	-2.469889	0.0214
DAU	2.252	9.9313	2.263363	0.0334
DAK	7.143	3.3713	2.120859	0.0449
OTSUS	4.364	6.3413	0.068829	0.9457
DUMMY	-5.112	1.5860	-3.232104	0.0037
BD	-1.973	5.7013	-0.344551	0.7336
C	30.417	1.2040	25.15479	0.0000
R-squared	0.742066	Mean dependent var	28.07900	
Adjusted R-squared	0.674779	S.D. dependent var	4.232529	
S.E. of regression	2.413732	Akaike info criterion	4.801189	
Sum squared resid	134.0004	Schwarz criterion	5.128135	
Log likelihood	-65.01783	Hannan-Quinn criter.	4.905782	
F-statistic	11.02837	Durbin-Watson stat	1.229156	
Prob(F-statistic)	0.000008			

Sumber : Data diolah, 2024

$$Y_{it} = 30,41 - 2,13DBH_{it} + 2,25 DAU_{it} + 7,14 DAK_{it} + 4,36 Otsus_{it} - 5,11 dummy_{it} - 1,97BD_{it}$$

- Nilai konstanta menunjukkan 30,41 yang berarti ketika DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Belanja Daerah, Dummy sama dengan 0 maka tingkat kemiskinan di Pulau Papua sebesar 30,41 persen.
- Nilai koefisien dari DBH adalah -2,13. Ini berarti ketika DBH meningkat 1 miliar maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -2,13 persen.
- Nilai koefisien dari DAU adalah 2,25. Ini berarti ketika DAU meningkat 1 miliar maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 2,25 persen.
- Nilai koefisien dari DAK adalah 7,14. Ini berarti ketika DAK meningkat 1 miliar maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,14 persen.
- Dana Otonomi Khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Papua karena nilai *p-value* 0,9457 > 0,05.

- f) Koefisien dummy dana desa menunjukkan nilai -5,11. Hal ini menunjukkan adanya dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
- g) Belanja daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Papua karena nilai *p-value* $0,7336 > 0,05$.

4.3.Uji-F

Nilai *p-value* pada uji-F sebesar $0,000008 < 0,05$ yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel DBH, DAU, DAK, dana otsus, dana desa, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Papua.

4.4.Uji-t

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji t:

Tabel 4. Uji t

Variabel	Koefisien	<i>p-value</i>
Konstanta	30,41	0,0000
DBH	-2,13	0,0214
DAU	2,25	0,0334
DAK	7,14	0,0449
Dana Otsus	4,36	0,9457
Dummy	-5,11	0,0037
Belanja Daerah	1,97	0,7336

Sumber : Data diolah, 2024

Berikut merupakan interpretasi dari setiap variabel :

- a) Nilai *p-value* dari DBH sebesar $0,0214 < 0,05$ dengan nilai koefisien -2,13 yang berarti DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.
- b) Nilai *p-value* dari DAU sebesar $0,0334 < 0,05$ dengan nilai koefisien 2,25 yang berarti DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.
- c) Nilai *p-value* dari DAK sebesar $0,0449 < 0,05$ dengan nilai koefisien 7,14 yang berarti DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.
- d) Nilai *p-value* dari dana otonomi khusus sebesar $0,9457 > 0,05$ yang berarti dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.

- e) Nilai *p-value* dari belanja daerah sebesar $0,7336 > 0,05$ yang berarti belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.
- f) Nilai *p-value* dari variabel dummy sebesar $0,0037 < 0,05$ yang berarti dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Papua.

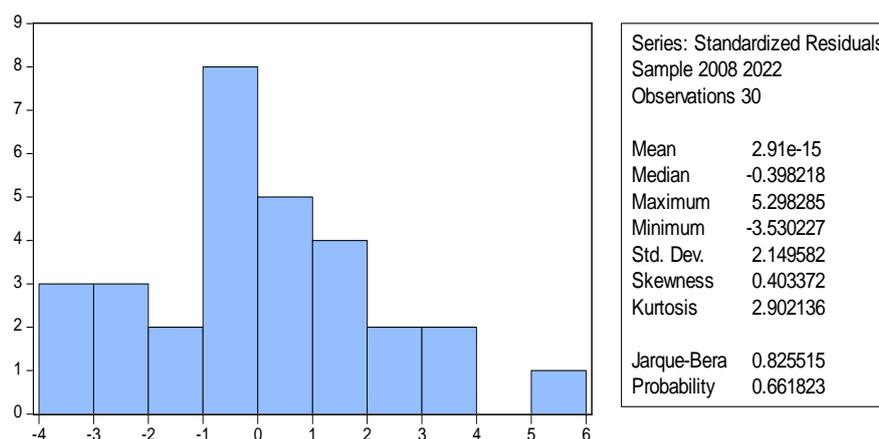
4.5. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dianalisis menggunakan nilai *Adjusted R-squared*. Berdasarkan Tabel 3. hasil regresi data panel diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,67 yang berarti kemampuan menjelaskan dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 67 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.

4.6. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas pada Gambar 2, diketahui bahwa data terdistribusi normal. Hal ini karena nilai *p-value* Jarque Bera sebesar $0,66 > 0,05$.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 3. Uji Normalitas

b) Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil analisis uji multikolienaritas pada penelitian ini:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	DBH	DAU	DAK	OTSUS	DUMMY	BD
DBH	1.000000	-0.040091	0.429699	0.164512	0.493086	0.341434
DAU	-0.040091	1.000000	-0.046528	0.500615	0.326217	0.620779
DAK	0.429699	-0.046528	1.000000	0.394829	0.344476	0.403362
OTSUS	0.164512	0.500615	0.394829	1.000000	0.649934	0.732834
DUMMY	0.493086	0.326217	0.344476	0.649934	1.000000	0.765313
BD	0.341434	0.620779	0.403362	0.732834	0.765313	1.000000

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat diketahui bahwa data lolos uji multikolinearitas karena nilai dari *correlation* semua variabel independen mempunyai nilai $< 0,9$.

c) Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil analisis uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>p-value</i>
DBH	0,1134
DAU	0,8685
DAK	0,2311
Dana Otsus	0,9916
Dummy	0,6888
Belanja Daerah	0,8050

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, maka dapat diketahui bahwa data lolos uji heteroskedastisitas karena nilai dari *p-value* semua variabel bebas $> 0,05$.

d) Uji Autokorelasi

Berikut merupakan hasil analisis uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
Nilai <i>Durbin-Waston</i> (d)	1,229156
dL	0,9982
dU	1,9313
4-dU	2,0687

Sumber : Data diolah, 2024

Dari pengujian autokorelasi diatas maka diketahui bahwa pada penelitian ini nilai *Durbin-Waston* (d) berada lebih besar dari dL dan lebih kecil dari dU ($dL < d < dU$) karena nilainya $0,9982 < 1,229156 < 1,9313$. Hal ini berarti bahwa pada penelitian ini hasil uji autokorelasi adalah tidak ada keputusan sehingga dapat ditoleransi.

Pembahasan

1. Pengaruh DBH terhadap Kemiskinan di Papua

DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DBH meningkat maka akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ismail & Hakim (2014) yang menjelaskan bahwa realisasi DBH mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pulau Papua yang kaya akan sumber daya alam memperoleh DBH yang besar sehingga dapat digunakan untuk peningkatan program-program yang berkaitan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin besar perolehan DBH maka akan semakin mampu menurunkan angka kemiskinan di Pulau Papua.

2. Pengaruh DAU terhadap Kemiskinan di Papua

DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini berarti ketika DAU bertambah mampu meningkatkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wijaya et al., (2018) yang menjelaskan bahwa adanya DAU meningkatkan tingkat kemiskinan. Penggunaan DAU yang bersifat block grant memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah sehingga justru menimbulkan banyak ketidakefektifan dalam realisasinya. Hal ini disebabkan karena DAU kerap kali digunakan untuk pembiayaan administrasi daerah sehingga realisasi DAU tidak optimal dan tidak difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan.

3. Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan di Papua

DAK berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini berarti ketika DAK bertambah mampu meningkatkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail & Hakim (2014) serta Widiyanto et al., (2016) yang menjelaskan bahwa adanya DAK justru meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya DAK peruntukkannya difokuskan pada tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan peningkatan infrastruktur sehingga tidak mampu menekan angka kemiskinan secara langsung. Aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan ketiga aspek yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal manusia dibandingkan untuk mengentaskan angka kemiskinan.

4. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Papua

Dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Papua. Hal ini berarti keberadaan dana otonomi khusus tidak mampu meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat Papua. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kadafi & Murtala (2020) yang menjelaskan bahwa dana otonomi khusus tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini

karena adanya dana otonomi khusus sering salah dalam pemanfaatannya sehingga tidak efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Budiratna & Qibthiyah (2020) menjelaskan bahwa dana otonomi khusus dalam pemanfaatannya digunakan untuk program-program yang kurang berkualitas dan tidak memberikan dampak jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Papua

Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Papua. Hal ini berarti bahwa belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ika et al., (2020) yang menjelaskan bahwa belanja daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena proporsi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah seringkali lebih sering digunakan untuk belanja pegawai daripada untuk belanja modal. Oleh karena itu, adanya belanja daerah pada akhirnya tidak mampu menekan angka kemiskinan.

6. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Papua

Dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Papua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dana desa dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin besar dana desa yang diberikan maka percepatan penurunan tingkat kemiskinan lebih mudah untuk dicapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sigit & Kosasih (2020) yang menjelaskan bahwa adanya dana desa dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian desa. Semakin baik kondisi perekonomian suatu masyarakat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Susilowati et al., (2017) menjelaskan bahwa adanya dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan sehingga efektif dalam pengentasan masalah kemiskinan.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

SIMPULAN

DBH dan Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Papua, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Dana Otonomi Khusus dan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat perlu meningkatkan pengoptimalan penggunaan dana

perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi penggunaan dana perimbangan tersebut difokuskan untuk melakukan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan di Pulau Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. A., & Rauf, H. A. T. U. (2020). Does village fund transfer address the issue of inequality and poverty? A lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 10(7), 433–422.
- Aziz Sholeh, Abdul et al. (2024). Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Aziz, N. L. L. (2017). The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 1–13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Khoirunurrofik. (2020). Fiscal decentralisation and capital expenditure composition of regional government in Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 13(1), 81–88. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2020.104909>
- Granado, F. J. A., Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2018). Decentralized governance, expenditure composition, and preferences for public goods. *Public Finance Review*, 46(3), 359–388.
- Gujarati, D. (2013). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Gumelar, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(2), 342–364.
- Hanif, I., Sharif Chaudhry, I., & Wallace, S. (2014). Fiscal Autonomy and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 34, 767–780.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Ika, N., Fitriyanti, & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Aplikasi Bisnis*, 9(15), 173–175.

- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Khusaini, M. (2014). Local government planning and budgeting process: A case of districts and cities in Indonesia. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.063190>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra Merek Persepsi Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27–36.
- Lucia, M., Walewangko, E., & Pingkan, I. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, dan PAD Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 37–48.
- Mandupessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4, 39–57.
- Mardiansyah, N., Abdul, A. A., & Suharno. (2023). The Influence of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Village Funds on Poverty in the Special Region of Yogyakarta Province. *MYIC*, 182–196.
- Mudrajad, K. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & ... (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 247–261.
- Permai, S. D., Christina, A., & Santoso Gunawan, A. A. (2021). Fiscal decentralization analysis that affect economic performance using geographically weighted regression (GWR). *Procedia Computer Science*, 179, 399–406. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.022>
- Ramírez, J. M., Díaz, Y., & Bedoya, J. G. (2017). Property Tax Revenues and Multidimensional Poverty Reduction in Colombia: A Spatial Approach. *World Development*, 94, 406–421. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.005>
- Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. *Comparative Political Studies*, 47(13), 1830–1855. <https://doi.org/10.1177/0010414013520524>
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81(101493).
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>

- Solomon, B. D. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 42, 526–527. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Widianto, A., Sedyu, U., & Langgeng Nurmansyah, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 5(2), 170–176.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 156–166.